

ABSTRAK

A. Zaky Fuad, 128502203001, 2022, **Transformasi Badan Kredit Desa Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada BKD di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi)**. Tesis. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pembimbing I: Dr. H. Asmawi., M.Ag Pembimbing II: Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag, M.HI

Kata Kunci : Transformasi, BKD, Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat, yang mana peraturan ini menuntut BKD untuk membuat rencana tindak (*action plan*) dan melakukan proses transformasi menjadi lembaga keuangan yang legal dan diakui Undang-Undang.

Fokus dan Pertanyaan dalam penelitian ini adalah: (1) transformasi BKD menjadi LKM sebelum POJK Nomor 10 Tahun 2016?; (2) transformasi BKD menjadi LKM sesudah POJK Nomor 10 Tahun 2016?; dan (3) transformasi BKD menjadi LKM dalam perspektif hukum ekonomi syariah?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan konsep, dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipan, wawancara mendalam kepada pihak BUMDES yang ada di Kecamatan Genteng dan beberapa pihak yang terkait dan metode dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis deduksi, induksi dan komparasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bumdes Lembu Suro Genteng Kulon tidak bergabung dengan Bumdes Bersama, Bumdes Lumbung Makmur Genteng Wetan bergabung dengan Bumdes Bersama dan Bumdes Rukun Makmur Kembiritan tidak bergabung dengan Bumdes Bersama. Ketiga Bumdes ini telah menjalankan “Tiga Pilar Baru” yang digagas oleh William Richard Scott dengan tiga indikator, yaitu: *Regulative, Normative* dan *Cultural-Kognitif*. Masing-masing indikator mempunyai aspek pandang sebagai berikut: (1) dasar kepatuhan, (2) dasar aturan, (3) mekanisme pelaksanaan, (4) logika sanksi, (5) indikator pertimbangan sanksi, (6) dampak penetapan sanksi, dan (7) dasar penetapan legitimasi. Bumdes Lembu Suro Genteng Kulon dalam aspek “mekanisme” tidak menjalankan konsep scot (*Regulative, Normatif* dan *Cultural-Cognitive*), melainkan menerapkan mekanisme dengan membangun mekanisme komunikasi antara pengurus BKD atau Bumdes dengan Pemerintah Daerah, dan jika dipandang perlu memfasilitasi atas kebuntuan komunikasi tersebut sebagai bagian dari aspek normatif. Bumdes Lumbung Makmur Genteng Wetan dalam aspek “mekanisme” tidak menjalankan konsep scot (*Regulative, Normative* dan *Cultural-Cognitive*), melainkan menerapkan mekanisme transformasi atau mendirikan institusi dengan cara melakukan “komunikasi” sebagai bagian dari aspek normatif. Bumdes Rukun Makmur Kembiritan dalam aspek “mekanisme” tidak menjalankan konsep scott (*Regulative, Normative* dan *Cultural-Cognitive*),

melainkan menerapkan mekanisme transformasi atau mendirikan institusi dengan melakukan “fasilitasi dan harmonisasi” sebagai bagian dari aspek normatif. Ketiga Bumdes ini mempunyai persepsi yang sama terhadap keharusan BKD bertransformasi pasca terbitnya POJK Nomor 10/POJK.03/ Tahun 2016. Namun karena minimnya data BKD dan langkanya pengurus BKD, maka yang ditempuh tidak melakukan transformasi, melainkan langsung membentuk atau mendirikan Bumdes dengan segala dinamikanya. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah bahwa transformasi atau mendirikan institusi merupakan bagian dari *sunnatullah* untuk merubah keadaan ke arah kondisi yang lebih baik dan bahwa melaksanakan kebijakan pemerintah selama berorientasi kepada kemaslahatan umat wajib hukumnya, sekalipun keputusan atau kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah tidak berasaskan Islam. Bahwa berdasar pada perspektif konsep Scott, pelaksanaan keputusan atau kebijakan pemerintah berlaku secara totalitas, baik dari segi dasar hukum, mekanisme dan dasar legitimasi institusi. Kemudian, bahwa melalui konsep *qiyas* atau *analogi*, transformasi BKD termasuk ke dalam akad *hiwalah* (pengalihan hutang). Dengan *analogi*, BKD dianalogikan sebagai *muhal* atau *dain* (orang yang memberi hutang atau pinjaman), Peminjam atau Nasabah (Perorangan atau Kelompok) dianalogikan sebagai *muhil* atau *madin* (pihak yang berhutang), Bumdes atau PT. LKM Bumdes Bersama dianalogikan sebagai *muhtal* atau *muhtal alaih* (pihak yang menerima pindahan utang/pinjaman), dan Nominal Pinjaman dianalogikan sebagai *muhal bih* (nominal utang/pinjaman). Pada akhirnya ada beberapa BKD yang tidak melakukan transformasi dan ada BKD yang melakukan kerja sama di tingkat Kabupaten melalui PT. LKM Bumdes Bersama Kabupaten Banyuwangi.

ABSTRACT

A Zaky Fuad. 128502203001. 2022. *Transformation of the Village Credit Agency into a Microfinance Institution with a Sharia Economic Law Perspective (Study on BKD in Genteng District, Banyuwangi Regency)*. Thesis. Sharia Economic Law Study Program. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung. Advisors I: Dr. H. Asmawi., M.Ag Advisor II: Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag, M.HI

Keywords: Transformation, BKD, Sharia Economic Law

This research is motivated by the rise of the Financial Services Authority Regulation (POJK) 10/POJK.03/2016 concerning the Fulfillment of Provisions for Rural Banks and the Transformation of Village Credit Boards Given Status as Rural Banks, which this regulation requires BKD to make an action plan (action plan) and carry out the process of transformation into a financial institution that is legal and recognized by law.

The focus and questions in this research are: (1) the transformation of BKD into an MFI before POJK Number 10 of 2016?; (2) transformation of BKD into MFI after POJK Number 10 of 2016?; and (3) transformation of BKD into MFI in the perspective of sharia economic law? This research employs empirical legal research with a sociological juridical approach, a conceptual approach, and a statutory approach. Data collection was carried out by participant observation, in-depth interviews with BUMDES in Genteng District and several related parties and documentation methods, then analysed using deduction, induction and comparative analysis.

The results showed that the Bumdes Lembu Suro Genteng Kulon did not join the Bumdes Bersama, the Bumdes Lumbung Makmur Genteng Wetan joined the Bumdes Bersama and the Bumdes Rukun Makmur Kembiritan did not join the Bumdes Bersama. These three Bumdes have implemented the "Three New Pillars" initiated by William Richard Scott with three indicators, namely: regulatory, normative and cultural-cognitive. Each indicator has the following aspects of view: (1) the basis of compliance, (2) the basis of the rules, (3) the implementation mechanism, (4) the logic of sanctions, (5) the indicators for the consideration of sanctions, (6) the impact of the determination of sanctions, and (7) basis for determining legitimacy. Bumdes Lembu Suro Genteng Kulon in the "mechanism" aspect does not implement the scot concept (regulative, normative and cultural-cognitive), but implements a mechanism to build a communication mechanism between BKD or Bumdes management and the Regional Government, and if deemed necessary to facilitate the communication impasse as part from a

normative aspect. Bumdes Lumbung Makmur Genteng Wetan in the "mechanism" aspect does not implement the scot concept (Regulative, Normative and Cultural-Cognitive), but implements a transformation mechanism or establishes an institution by means of "communication" as part of the normative aspect. Bumdes Rukun Makmur Kembiritan in the aspect of "mechanism" does not implement the Scott concept (Regulative, Normative and Cultural-Cognitive), but implements a transformation mechanism or establishes an institution by carrying out "facilitation and harmonization" as part of the normative aspect. These three Bumdes have the same perception of the necessity for BKD to transform after the issuance of POJK Number 10/POJK.03/ 2016. However, due to the lack of BKD data and the scarcity of BKD management, what is taken is not to transform, but directly to form or establish Bumdes with all its dynamics. In the perspective of Sharia Economic Law, that transformation or establishing institutions is part of the *sunnatullah* to change the situation towards better conditions and that implementing government policies as long as they are oriented to the benefit of the people is obligatory, even if the decisions or policies made by the government are not based on Islam. Whereas based on Scott's concept perspective, the implementation of government decisions or policies applies in totality, both in terms of legal basis, mechanism and institutional legitimacy basis. Then, that through the concept of *qiyas* or analogy, the transformation of BKD is included in the *hiwalah* contract (debt transfer). By analogy, BKD is analogous to *muhal* or *dain* (people who give debts or loans), Borrowers or Customers (individuals or groups) are analogous to *muhil* or *madin* (debtors), Bumdes or PT. LKM Bumdes Bersama is analogous to *muhtal* or *muhtal alaih* (the party who receives the transfer of debt/loans), Nominal Loans are analogous to *muhal bih* (debt/loan nominal). In the end there were several BKDs that did not carry out the transformation and there were BKDs that did not cooperate at the district level through PT. LKM Bumdes with Banyuwangi Regency.

الملخص

أحمد زكي فؤاد، ٢٠٢٠، ١٢٨٥٠٢٢٠٣٠١، تحويل هيئة إئتمان القرية تكون إلى المؤسسة المالية الصغيرة عند حكم الأقتصادية الشرعية (الدراسة في هيئة إئتمان القرية بمنطقة غانتيغ مدينية بإنجوانجي). رسالة الماجستير، قسم حكم الإقتصادية الشرعية. جامعة سيد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية تولوغ أغوغ. المشرف الأول: الدكتور اسماوي الماجستير المشرف الثاني: الدكتور كتب الدين اياك الماجستير.

الكلمات المفتاحية : التحويل، هيئة إئتمان القرية، حكم الأقتصادية الشرعية .

هذا البحث خلفية بإصدار لوائح هيئة الخدمة المالية رقم ١٠ /POJK.03 /لعام ٢٠١٦ ما يتعلّق بإنجاز الشروط البنك لإئتمان الراعية و تحويل هيئة إئتمان القرية المعطى بالوضع كالبنك لإئتمان الراعية، ما هذا القانون يتطلّب إلى هيئة إئتمان القرية لصنع خطّة العمل و عملية التحويل إلى مؤسسة المالية الحقيقة و المعتمد بالقانون

الراكر و الأسئلة في هذا البحث هو:(١) تحويل هيئة إئتمان القرية إلى إلى المؤسسة المالية الصغيرة قبل لوائح هيئة الخدمة المالية رقم ١٠ سنة ٢٠١٦ ، (٢) تحويل هيئة إئتمان القرية إلى إلى المؤسسة المالية الصغيرة بعد لوائح هيئة الخدمة المالية رقم ١٠ سنة ٢٠١٦ ، (٣) تحويل هيئة إئتمان القرية إلى إلى المؤسسة المالية الصغيرة عند حكم الأقتصادية الشرعية؟

. والمدخل المستخدم هو نوع من البحث الحكمي التجاري بنهج قانوني اجتماعي، منهج المفهومي، ومنهج الدستوري. وكان جمع البيانات بطريقة الملاحظة المشتركة والمقابلة العميقية مع الشركة المملوكة للقرية في منطقة غانتيغ والأجزاء المتعلقة ، ثم تحليلها باستخدام التحليل الإستنتاج، الإستقراء، والمقارنة.

وأما نتائج البحث تدليل أن الشركة المملوكة للقرية لامبو سورو غانتيغ الغربية لا ينضم بالشركة المملوكة للقرية المعيبة، الشركة المملوكة للقرية لمبوج معمور غانتيغ الشرقية ينضم بالشركة المملوكة المعيبة، و الشركة المملوكة للقرية روكون معمور كاميبريتان لا ينضم بالشركة المملوكة المعيبة. هذه الشركة المملوكة للقرية الثلاثة يفوق "ثلاثة العمام الجديد" متصرّر بوليلام ريجارد سجوت بثلاثة مؤشر، هو: التنظيمي، المعياري، و الثقافة المعرفية. كل من المؤشر يملك وجهاً نظر كالتالي: (١) أساس الإمثال، (٢) أساس القانون، (٣) آلية التنفيذ، (٤) منطق العقاب، (٥) مؤشر تعليل العقاب، (٦) تأثير تقرير العقاب، (٧) أساس تقرير الشرعية. الشركة المملوكة للقرية لامبو سورو غانتيغ الغربية في ناحية "الآلية" لا يعمل تصوّر سجوت (التنظيمي، المعياري، و الثقافة المعرفية)، بل يطبق الآلية ببناء الآلية الإتصالية بين جنة هيئة إئتمان القرية او الشركة المملوكة للقرية بحكومة الخلية، بل إذا لزم الأمر لتبسيط على ذلك إحتقان الإتصال كجزء من ناحية المعياري. الشركة المملوكة للقرية لمبوج معمور غانتيغ الشرقية في

ناحية "الآلية" لا يعمل تصور سجوت (التنظيمي، المعياري، و الثقافة المعرفية)، بل يطبق آلية التحويل او يقوم المؤسسة لعمل "الاتصال" كاجزء من ناحية المعياري. الشركة المملوكة للقرية روكون معمور كامببريتان في ناحية "الآلية" لا يعمل تصور سجوت (التنظيمي، المعياري، و الثقافة المعرفية)، بل يطبق آلية التحويل او يقوم المؤسسة لعمل "التسهيل و التنسيق" كاجزء من ناحية المعياري. . هذه الشركة المملوكة للقرية الثلاثة لديهم نفس التصور إلى وجود هيئة ائتمان القرية لتحول بعد إصدار لواح هيئة الخدمة المالية رقم ١٠ /POJK.03/عام ٢٠١٦. بل لقلة البيانات من هيئة ائتمان القرية ولجنة هيئة ائتمان القرية، حتى يسلك بلا عمل التحويل، بل يشكل الشركة المملوكة للقرية مباشرة بجميع ديناميكيه. في منظور حكم الإقتصادية الشرعية أن التحويل او إقامة المؤسسة جزء من سنة الله لتغيير الحال الى إتجاه أفضل و أن تنفيذ سياسة الحكومة طول يتوجه اي مصلحة الأمة واجب، ما فتئ القرارات بدون أساس الإسلام. أن يعتمد الى منظور سجوت، تنفيذ القرارات او سياسة الحكومة ينطبق كاملا، إنما من ناحية أساس القانوني، الآلية، و الأساس الشرعية المؤسسة. ثم، أن بمفهوم القياس، تحويل هيئة ائتمان القرية حاشا من عقد الحوالة (تحويل الدين). بالقياس، هيئة ائتمان القرية مماثل كالمحال او الدائن، والعميل (شخصية او جمعية) مماثل كالخليل او المدين، . الشركة المملوكة للقرية او PT. LKM BUMDES BERSAMA مماثل كالمحال او المحتج عليه، والقرض الإسمى مماثل كالمحال به. في النهاية، هناك بعض من هيئة ائتمان القرية لا يعمل التحويل و هناك هيئة ائتمان القرية الذي يعمل التعاون من خلال PT. LKM BUMDES BERSAMA KABUPATEN BANYUWANGI .